

(11)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE:  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 16

TAHUN 2006

LINGKUNGAN HIDUP

## Tujuh Sungai di Kutai Barat Tercemar Batu Bara

**BALIKPAPAN (Media):** Sebuah kasus pencemaran lingkungan terjadi di Kutai Barat, Kalimantan Timur, mengakibatkan masyarakat menderita sakit.

Sejak beberapa bulan lalu, lima sungai di Kutai Barat tercemar limbah batu bara yang diproduksi PT Purbaindo Coal Mining (Banpu), perusahaan tambang milik pengusaha Thailand. Lima sungai itu adalah Pusung, Pentahan, Begai, Lawa, dan Nyoman.

Pencemaran itu membuat Sungai Lawa yang mengalir di Kampung Bengkek Kecamatan Muara Lawa, Kutai Barat berubah warna menjadi kehijau-hijauan. Kondisi itu juga mengakibatkan ikan-ikan mati dan masyarakat sekitar yang menggu-

nakan air tersebut menderita diare dan gatal-gatal.

"Masyarakat sudah mengeluhkan pencemaran itu. Bahkan secara lisan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat meminta untuk menutup aktivitas perusahaan itu," ujar Wakil Bupati Kutai Barat Didik Effendi, kemarin.

Luapan limbah terjadi di kawasan tambang batu bara PT Banpu yang beroperasi setahun terakhir. Peristiwa serupa sebetulnya telah terjadi sejak delapan bulan lalu.

"Tujuh atau delapan bulan lalu sudah ada laporan dari masyarakat pemilik kebun karet. Ketika terjadi banjir, pohon itu mulai membusuk perlahan-lahan dan tidak berproduksi lagi," jelas Bupati Kutai Barat

Ismail Thomas di Jakarta, tadi malam.

Pencemaran, menurutnya, terjadi karena letak penampungan limbah batu bara milik perusahaan tersebut sangat berdekatan dan seairan dengan Sungai Lawa. Sedangkan pertambangan itu merupakan tambang batu bara yang bersifat lahan terbuka.

Air Sungai Lawa digunakan masyarakat sekitar untuk minum dan mandi. Sungai itu mengalir melewati tujuh kampung, yaitu Muara Begai, Lotaag, Pusung, Payaang, Cempedas, Muara Lawa, dan Lambing.

Dalam menindaklanjuti kasus itu, sebuah tim dibentuk, terdiri dari aparat kepolisian, Pemerintah

Kabupaten Kutai Barat, dan Dinas Pertambangan.

Saat ini, hak eksplorasi tambang di Kutai Barat hanya dimiliki dua perusahaan, termasuk PT Banpu. Perusahaan lain yang telah beroperasi selama delapan tahun di sana ialah PT Gunung Bayan milik investor Malaysia yang memproduksi 350 ribu hingga 400 ribu ton batu bara per bulan. PT Banpu memiliki target produksi 500 ribu ton per bulan.

Sementara itu, 104 perusahaan tengah menunggu izin eksplorasi tambang. Wilayah Kutai Barat memiliki potensi pertambangan seperti uranium, emas, intan, batu bara, mangan, dan gas metan.

(SU/ZH/X-9)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input checked="" type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST <b>SEPT</b> OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN: <b>A20</b>		TAHUN 2006

## Perusahaan Induk Pertambangan Butuh Insentif

JAKARTA — Pemerintah disarankan memberikan perlakuan khusus kepada perusahaan induk pertambangan (Indonesian Resources Company). Tujuannya agar para pemegang saham publik tertarik dengan rencana pemerintah tersebut.

Sumber *Tempo* mengatakan perlakuan khusus (privilese) itu bisa dalam bentuk rekomendasi bagi setiap perusahaan swasta nasional atau asing yang hendak melakukan eksplorasi agar bekerja sama dengan perusahaan induk tersebut. Usul itu, kata dia, tercantum dalam hasil kajian Citigroup atas rencana pembentukan

perusahaan induk pertambangan itu.

"Mereka (Citigroup) memang disewa untuk mengkaji langkah pemegang saham pemerintah di masing-masing perusahaan pertambangan," kata sumber itu di Jakarta pekan lalu.

Saat ini pemerintah memiliki tiga perusahaan pertambangan, yaitu PT Aneka Tambang Tbk., PT Timah Tbk., dan PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk. Di ketiga perusahaan itu, pemerintah menguasai masing-masing sekitar 65 persen saham. Sisa saham selebihnya dimiliki investor publik.

Pemerintah berencana memben-

tuk perusahaan induk pertambangan, yang diberi nama Indonesian Resources Company, dan akan membawahkan ketiga perusahaan pertambangan tadi. Namun, ada dugaan pembentukan perusahaan induk pertambangan ini tak akan mulus karena investor publik belum tentu menyetujui rencana tersebut.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Sugiharto kepada *Tempo* pekan lalu menjelaskan, manajemen ketiga perusahaan telah merampungkan kajian pembentukan perusahaan induk pertambangan itu dan telah menyerahkannya ke Ke-

menterian BUMN. Meski kajian telah dilakukan sejak tahun ini, kata dia, tenggat pembentukan perusahaan induk pertambangan masih cukup lama, yakni pada 2009. "Kami harus berhati-hati dan melihat konteksnya saat ini," kata dia.

Sekretaris Menteri BUMN Said Didu pernah mengungkapkan, pemerintah ada kemungkinan akan memilih bentuk *investment holding* untuk perusahaan induk. Nantinya perusahaan induk tidak memiliki kegiatan operasional karena operasi ini tetap berada di masing-masing perusahaan pertambangan. ● BUDI RIZA

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE:  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 7

TAHUN 2006

## APBI Minta Ditjen Bea Cukai Hentikan Pungutan Batu Bara

JAKARTA - Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) meminta kepada seluruh cabang Ditjen Bea Cukai menghentikan pungutan ekspor (PE) batu bara, yang besarnya 5% dari harga jual.

Ini dilakukan guna menindaklanjuti pembatalan pemberlakuan PE batu bara oleh Mahkamah Agung (MA), dengan Surat Keputusan MA No 07 P/HUM/2006.

"Senin atau Selasa ini kami akan berkirim surat ke seluruh cabang Bea Cukai untuk menghentikan pungutan itu," kata Ketua Umum APBI Jeffrey Mulyono kepada *Investor Daily*, Minggu (3/9).

Menurut Jeffrey, PE batu bara secara resmi diberlakukan pada 23 Desember 2005 dengan dikeluarkannya Permenkeu No 131/PMK 010/2005 tentang PE batu bara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perusahaan batu bara, kecuali ekspor produksi batu bara untuk kontrak Generasi I. "Saya perkirakan, semua uang yang ditarik oleh Bea Cukai sebagai PE tidak bisa ditarik kembali oleh perusahaan karena putusan MA 21 Agustus itu," tuturnya.

Dia menjelaskan, putusan MA baru sampai kepada Ditjen Bea Cukai pada 22 Agustus 2006. "Ini yang masih jadi pertanyaan, apakah mulai 21 Agustus sampai batas terakhir penarikan PE bisa diklaim oleh perusahaan batu bara, ini yang akan kami diskusikan dengan Dirjen Bea Cukai," jelasnya.

Dia mengatakan, sekitar 70% dari produksi batu bara nasional 165 juta ton saat ini diekspor dengan harga pada kisaran US\$ 30 per ton. (ari/lim)